

RESPON MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM MENANGGAPI ISU PENGENTASAN KEMISKINAN SAAT PILPRES 2024 DI DESA KASIHAN KABUPATEN PACITAN

Febrye Mistriana

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), febrye.20054@mhs.unesa.ac.id

Maya Mustika Kartika Sari

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan *survey* terkait isu yang paling diminati selama masa Pilpres 2024 yaitu isu pengentasan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan salah satunya dituangkan melalui kebijakan pemberian bantuan sosial. Desa Kasihan merupakan penerima bansos terbanyak di Kabupaten Pacitan. Ketika musim pemilu, bantuan sosial digunakan untuk kepentingan politik. Hasil *survey* Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial menentukan perilaku memilih masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui respon masyarakat penerima bantuan sosial dalam menanggapi isu pengentasan kemiskinan saat Pilpres 2024 di Desa Kasihan Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Temuan dari penelitian ini terdapat tiga bentuk utama respon yakni, respon apatis, respon pragmatis, dan respon kritis. Ketiga respon lahir dari konteks berbeda yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kepentingan ekonomi, dan pengalaman interaksi. Ketiga respon tidak muncul secara terpisah akan tetapi membentuk kontinuitas kesadaran politik. Melalui teori respon S-O-R dari Hovland dijelaskan bahwa perilaku manusia muncul karena adanya rangsangan eksternal (stimulus) yang diterima individu kemudian diolah oleh faktor internal (organisme) sebelum menghasikan tindakan/respon tertentu.

Kata Kunci: Respon, Masyarakat Penerima Bansos, Isu Pengentasan Kemiskinan.

Abstract

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) conducted a survey on the most pressing issue during the 2024 presidential election, namely poverty alleviation. One of the government's efforts to alleviate poverty is through social assistance policies. Kasihan Village is the largest recipient of social assistance in Pacitan Regency. During the election season, social assistance is used for political purposes. The results of a survey by the Indonesian Survey Institute (LSI) stated that the provision of social assistance determines people's voting behaviour. This study aims to determine the response of social assistance recipients to the issue of poverty alleviation during the 2024 presidential election in Kasihan Village, Pacitan Regency. This study uses a qualitative method with a phenomenological design. Data collection techniques include observation and interviews. The findings of this study reveal three main forms of response, namely apathetic, pragmatic, and critical responses. These three responses arise from different contexts influenced by levels of knowledge, economic interests, and interaction experiences. The three responses do not appear separately but form a continuum of political awareness. Hovland's S-O-R response theory explains that human behaviour arises due to external stimuli received by individuals, which are then processed by internal factors (organisms) before producing certain actions/responses.

Keywords: Response, Social Assistance Recipients, Poverty Alleviation Issues.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilu sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Pemilu yang dimaksud adalah untuk memilih anggota legislatif atau eksekutif. Pemilu yang diadakan lima tahun sekali ini memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berhak duduk di kursi pemerintahan (Hasibuan, 2023, hlm. 605). Pemilu sebagai pilar demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga cerminan dinamika politik suatu bangsa.

Dengan adanya hal tersebut membuat para calon kandidat berlomba untuk mendapatkan kursi yang tersedia. Dalam rangka mempersiapkan pemilu ini, sangat umum kita ketahui bahwa masing-masing calon memiliki strategi untuk memenangkan pertandingan. Para calon akan menjalankan strategi yang diyakininya mampu untuk menarik perhatian masyarakat luas. Karena semakin banyak yang memilih mereka sama dengan kemenangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh para kandidat biasa disebut dengan kampanye politik. Kampanye pada dasarnya merupakan suatu proses komunikasi dalam perbincangan politik untuk mencapai suatu kemenangan

(Mustofa, dalam Lestari dkk., 2024, hlm. 33). Kampanye politik memiliki peran penting untuk setiap kandidat. Oleh karena itu, setiap kandidat akan menggunakan masing-masing strategi untuk memenangkan pertandingan. Apabila kandidat abai terhadap kampanye, maka peluang untuk menang akan kecil. Banyak sekali isu yang diangkat mulai dari pendidikan gratis, makan gratis, kesejahteraan guru, isu perempuan, dan sebagainya.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan *survey* terkait isu yang paling banyak menarik simpati atau perhatian masyarakat luas salah satunya adalah mengenai isu pengentasan kemiskinan. Pentingnya pengentasan kemiskinan adalah berupaya memastikan bahwa individu dan kelompok memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar. Seperti pemenuhan makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek mulai dari perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan multidimensi karena dalam menanggulangnya melibatkan preferensi, nilai, dan juga politik (Sholeh, dalam Nurholifah dkk., 2024). Kemiskinan merupakan persoalan yang menjadi tantangan tersendiri di Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan suatu negara (Aisyah dkk., 2023, hlm. 3723). Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, UUD negara kita mengatur mengenai tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Upaya dalam pengentasan kemiskinan ini kemudian dirumuskan dalam kebijakan sosial yang menjadi acuan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan sosial dibuat oleh pemerintah untuk merespon isu-isu yang menjadi permasalahan dalam masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam merespon isu perlindungan sosial adalah dengan membuat kebijakan sosial berupa pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Program bansos sendiri merupakan agenda perlindungan sosial yang telah diatur dalam UU APBN pasal 8 ayat 2. Program bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami geyuran bansos cukup masif selama masa pilpres 2024. Di mana mencapai 5 kali pembagian. Desa Kasihan merupakan desa dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terbanyak di Kecamatan Tegalombo dengan 1165 jumlah KPM. Berdasarkan data yang diperoleh dari Penanggung Jawab bantuan sosial

yang ada di Desa Kasihan terdapat 20 Kartu Keluarga yang sudah menerima bantuan sosial lebih dari 5 tahun. Semakin lama mereka menerima bantuan sosial maka akan semakin bertambah intensi mereka untuk bergantung terhadap bansos tersebut. Sehingga, yang mereka pikirkan adalah terus berusaha untuk mempertahankan bantuan sosial yang telah mereka dapatkan.

Ketika musim pemilu, bantuan sosial ini justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Pengadaan bantuan sosial yang awalnya bertujuan untuk kepentingan rakyat menjadi dipertanyakan keberadaan maksud dan tujuannya. Media banyak menyoroti adanya pembagian bansos ini digunakan oleh pihak tertentu sehingga sarat akan nuansa politik sehingga adanya pergeseran makna yang diterima oleh masyarakat luas (Rini & Rahmawati, 2024, hlm. 12997).

Keputusan MKRI tentang keputusan hasil pemilu menjabarkan mengenai politisasi bansos yang dilakukan oleh Joko Widodo secara terstruktur yang dapat dilihat dari 4 aspek. Dari aspek waktu, Joko Widodo menginstruksikan percepatan pencairan dana bantuan sosial bertepatan dengan proses pemilihan presiden. Percepatan pembagian bantuan beras dampak El Nino mulai Januari 2024. Kemudian, bantuan langsung mitigasi resiko selama tiga bulan sebesar Rp.600 ribu dicairkan Februari 2024. Percepatan jadwal yang dibuat tentunya merupakan bentuk politisasi bansos dan pelanggaran terhadap proses pemberian bantuan sosial itu sendiri.

Politisasi bantuan sosial tampak dengan terjadinya peningkatan secara pesat pembagian bantuan sosial dimasa pilpres 2024 khususnya di bulan Desember 2023 sampai Februari 2024. Dimana pada masa pra-pilpres pada bulan Agustus 2023 sampai pertengahan Oktober 2023 pembagian bansos relatif stabil yakni sebanyak 5 kali. Kemudian, pada akhir Oktober 2023 mengalami kenaikan puncaknya pada Januari 2024 pembagian bansos dilakukan hingga 20 kali. Kemudian mengalami penurunan kembali pasca pilpres 2024 pada akhir Februari 2024 yakni sebanyak 5 kali.

Dari aspek jumlah Joko Widodo menaikkan dana perlindungan sosial dimasa pilpres 2024 untuk bantuan sosial secara masif hingga mencapai Rp. 496,8 triliun. Dari awalnya tahun 2023 yakni 443,5 triliun naik sekitar 53,3 triliun. Naiknya anggaran yang digunakan dinilai mampu meningkatkan elektabilitas kandidat. Melalui penetapan alokasi anggaran yang pro rakyat akan membentuk persepsi publik bahwa pemerintah memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi untuk benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah dkk., 2021, hlm. 29).

Selanjutnya dari aspek penerima penentuan sasaran penerima bantuan sosial ditengarai merupakan bagian dari rangkaian *abuse of power* terkoordinasi yang dilakukan

oleh Joko Widodo. Hal ini diperkuat dengan pernyataan anggota partai pendukung pasangan calon nomor urut 2 kepada media bahwa penyaluran bansos diutamakan ke tempat elektabilitas paslon 2 masih tertinggal. Dana dari rakyat tidak lagi dikucurkan demi rakyat namun demi mendulang suara agar paslon nomor urut 2 dapat memenangkan pilpres 2024 dalam satu kali putaran.

Kemudian, dari aspek pembagi secara eksplisit diakui oleh Menteri perdagangan Zulkifli Hasan di Kendal Jawa Tengah pada 26 desember 2023 dengan menyatakan “Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” sehari setelah Zulkifli Hasan membuat pernyataan tersebut kemudian ia mendampingi Presiden Jokowi untuk membagikan BLT EL Nino ke Banyuwangi. Sikap tersebut seolah-olah mengkonfirmasi bahwa pembagian bantuan sosial memang diperuntukkan untuk memenangkan paslon nomor urut 2.

Dalam kasus lain penerima bansos diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 juga terjadi. Seperti dilansir dari BBC News Indonesia ketika gencarnya penyaluran beras dan BLT EL Nino Menko bidang perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kampanye di Kendal Jawa Tengah pada 6 Desember 2023. Ketika audiens berkumpul ia melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan dalih untuk melanjutkan proyek yang telah dilakukan. Kebijakan pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu kebijakan yang bisa membantu kesejahteraan dan perekonomian masyarakat khususnya warga desa. Sehingga ketika mereka mendapatkan apa yang selama ini mereka harapkan, maka mereka menganggap bahwa pasangan calon yang melakukan kampanye ini pasti akan melakukan hal serupa ketika mereka memimpin nanti.

Melihat situasi melalui yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa politisasi sumber daya merupakan hal yang tidak dapat dihindari ketika musim pemilu. Politisasi ini juga bisa mengarah kepada praktik tidak etis, korupsi, dan manipulasi data yang dapat merusak integritas dan makna dari demokrasi itu sendiri. Pemberian bansos dengan sarat nuansa politik menyebabkan lingkungan demokrasi menjadi tidak sehat di mana kepentingan individu dan kelompok menjadi lebih penting daripada kepentingan publik (Nurcholifah dkk., 2024, hlm. 424).

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil terbarunya persepsi publik terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Salah satu yang menarik perhatian adalah survei terkait dengan penerimaan bantuan sosial dalam pemilu 2024. Berdasarkan data hasil survei sebanyak 24% pemilih mengaku menerima bantuan sosial. Dan dari 24% hasil

survei, mayoritas pemilih yang mendapatkan bansos dari pemerintah memilih pasangan Prabowo-Gibran sebanyak 69,3%. Sementara itu, untuk presentase memilih pasangan 01 dan 03 yang tidak menerima bansos lebih besar dari yang menerima. Namun meskipun demikian, keputusan MKRI bertentangan dengan bukti-bukti tersebut. Berdasarkan putusan MKRI Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil sejumlah menteri terlibat dalam upaya memenangkan Prabowo-Gibran. MK menolak dalil-dalil pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menuding sejumlah menteri dan pejabat negara lain terlibat dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Melalui putusannya MK menolak bukti-bukti yang menyatakan bahwa terdapat politisasi bansos, MK menyatakan bahwa dalil tersebut tidak beralasan karena tidak disertai oleh bukti yang mencukupi. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita dan video yang bersumber dari media online, tanpa diikuti oleh dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan dalil tersebut. MK pun menilai, substansi pemberitaan itu juga tidak menunjukkan secara spesifik, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara.

Kelompok penerima Bantuan Sosial sebagai pihak yang tergantung dengan pemerintah tentu saja memiliki sikap dalam menanggapi hal tersebut. Pertanyaan akan muncul mereka merupakan pihak yang memiliki respon apatis, pragmatis, atau kritis dalam memberikan respon terhadap isu politik lokal, melalui bansos yang diberikan mereka pasti berharap untuk mendapatkan suara dari masyarakat yang telah mereka beri bantuan.

Respon politik masyarakat menjadi hal yang penting mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi. Prinsip negara demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat menjadi hal yang penting karena mengingat permasalahan negara yang sangat kompleks. Partisipasi politik masyarakat sedikit banyak akan memengaruhi pemegang kekuasaan (Apriyani dkk., 2024, hlm. 74)

Masyarakat desa yang sudah ketergantungan dengan bansos akan berdampak pada respon mereka dalam menanggapi isu pengentasan kemiskinan saat pilpres 2024. Hal ini juga akan memengaruhi opini publik, pandangan, serta sikap masyarakat terhadap kandidat, partai politik, dan isu krusial yang dibawa. Kandidat yang mampu menyajikan narasi secara personal dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat menciptakan kedekatan emosional yang kuat (Rahmadi dkk., 2024, hlm. 246).

Selain itu faktor lain yang menjadi pengaruh masyarakat dalam memberikan respon antara lain faktor ekonomi yakni stabilitas ekonomi akan mempengaruhi mereka dalam memberikan pandangan politik. Faktor sosial yakni dinamika serta perubahan yang ada di dalam masyarakat, dan faktor kultural yakni faktor budaya yang mempengaruhi persepsi politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Menurut Sugiyono (2011, hlm. 55) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang kata-katanya tertulis maupun lisan yang didapatkan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sedangkan desain fenomenologi adalah suatu desain untuk melihat apa yang dialami manusia dari sudut pandang orang pertama, yaitu orang yang mengalaminya secara langsung. Fokusnya adalah struktur pengalaman kesadaran yaitu realitas objektif yang ada dalam pengalaman subjektif setiap individu. Dalam penelitian ini, informan dipertimbangkan melalui beberapa kriteria, yaitu: 1.) kelompok penerima bantuan sosial yang sudah berkeluarga, 2) sudah menerima bantuan sosial lebih dari 5 tahun, 3) aktif dalam organisasi atau kelompok rukun warga.

Penelitian ini berada di Desa Kasihan, yaitu dengan mengidentifikasi respon masyarakat penerima bantuan sosial dalam menanggapi isu pengentasan kemiskinan saat Pilpres 2024 di Desa Kasihan Kabupaten Pacitan. Pemilihan tempat disebabkan karena Desa Kasihan sebagai Desa yang masyarakatnya menerima bansos terbanyak di Kabupaten Pacitan. Selain itu, mempertimbangkan adanya dinamika menarik selama masa kampanye pilpres 2024 dalam masyarakat penerima bantuan sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nonton bareng (nobar) debat calon presiden dan calon presiden menjadi salah satu fenomena yang menonjol menjelang pilpres 2024 di Desa Kasihan. Masyarakat menyaksikan debat calon presiden dan wakilnya di rumah salah satu warga, warung, maupun di ruang publik sederhana. Beberapa ibu-ibu melakukan diskusi terkait visi misi pasangan calon. Kegiatan nobar ini memperlihatkan bahwasannya masyarakat Desa Kasihan memiliki ketertarikan awal terhadap isu politik. Selain melalui nobar masyarakat juga memperhatikan isu politik melalui media sosial, dialog antargenerasi, dan kampanye kandidat di desa.

“Kalau seringnya saya lihat dari berita TV nasional. Karena Kebiasaan warga desa biasanya nobar debat di rumah salah satu warga seperti itu. Selain itu juga dari media sosial terkadang status wa teman-teman yang lain.” (Wawancara SPH 47 th, 11 September 2025)

Apabila diperhatikan dari keseluruhan tema debat, isu yang paling banyak menarik perhatian adalah isu pengentasan kemiskinan. Mereka menganggap bahwa kemiskinan merupakan akar dari segala masalah. Kemiskinan menjadi hal yang penting untuk diatasi antara lain anak putus sekolah, petani miskin, dan desa sepi karena merantau. Pemilu menjadi ajang penting masyarakat untuk memilih pemimpin yang paham akan susahny hidup di pelosok. Masyarakat pelosok seperti di Desa Kasihan menginginkan tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar visi misi yang diutarakan dipertanggungjawabkan bukan hanya sekedar slogan.

“Paling penting, bahkan lebih dari infrastruktur jalan tol yang *nggak nyampe* desa kami. Mengapa? Karena di desa seperti Desa Kasihan, kemiskinan itu akar masalah mbak, petani miskin, anak putus sekolah, desa sepi karena merantau. Pilpres 2024 ini kesempatan buat pilih presiden yang paham susahny hidup di pelosok, janji bansos dan bantuan tani. Kalau nggak dibahas, berarti calon itu cuma mikirin kota besar, lupa kami yang bikin beras buat negeri ini.” (Wawancara AMN 48 th 12 September 2025)

Isu pengentasan kemiskinan menjadi sangat relevan di masyarakat. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Kasihan merupakan penerima bantuan sosial yang sudah bertahun-tahun terdaftar sebagai KPM. Bagi warga Desa Kasihan, kebijakan pemberian bansos bukan sekedar wacana politik. Akan tetapi, bagian dari pengalaman sehari-hari karena mereka merasakan manfaatnya secara langsung. Bantuan sosial ini, dinilai masyarakat membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti sekolah, pangan, dan kesehatan.

“Saya mulai terima bansos sejak 2019, pas program pemerintah Jokowi masuk desa kami lewat kepala desa. Yang saya dapat PKH untuk biaya sekolah putri saya, cair Rp 900.000 per triwulan itu yang paling penting, juga KIS untuk berobat di puskesmas desa, karena suami sering sakit pinggang gara-gara angkat keranjang panen. Kadang ada BLT desa tambahan pas Lebaran atau panen gagal. Bansos ini seperti napas tambahan buat kami, tanpa itu, lahan tanam bisa ditinggal karena nggak ada modal pupuk.” (Wawancara AMN 48 th 12 September 2025)

Bantuan Sosial (bansos) merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, atau komunitas yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Bantuan sosial memiliki kedudukan penting karena masyarakat memaknainya sebagai penopang hidup. Hal ini dikarenakan bansos digunakan untuk pemenuhan dasar seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan. Bagi masyarakat Desa Kasihan, bansos dianggap sebagai penyelamat ketika kondisi ekonomi keluarga berada pada titik sulit.

“...Bansos ini sudah cukup membantu mengatasi kebutuhan dasar. Tanpa bansos, kami pasti utang ke rentenir atau jual ternak. Tapi masih kurang untuk tabungan masa depan, seperti perbaiki rumah atau bantu anak nikah...” (Wawancara IN 52 th 14 September 2025)

Menjelang pilpres 2024, terdapat dinamika yang menarik dalam masyarakat penerima bantuan sosial. Kebijakan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial yang seharusnya netral dan menjadi hak warga terdapat penyalahgunaan. Seluruh informan mengakui bahwa terdapat politisasi bantuan sosial selama masa kampanye pilpres 2024. Beberapa bentuk politisasi bansos teridentifikasi dalam penelitian ini. Bentuk yang pertama yakni pembagian sembako dengan syarat mendukung pasangan calon tertentu. Hasil temuan lapangan, informan mengatakan bahwa pada masa kampanye pilpres 2024 pemberian bansos lebih sering daripada biasanya. Selain itu, pemberian bansos juga dilakukan dengan klaim untuk mendukung paslon tertentu.

“Iya, saya alami dan dengar langsung sebagai Ketua RT, mbak. Pas Maret 2024, tim kampanye paslon 2 datang ke balai desa, bagi sembako 5 kg beras dan 1 liter minyak ke penerima PKH di RW saya, tapi bilang secara halus, "Ini tambahan dari program pemerintah, dukung yang lanjutkan biar bansos aman terus." Saya sendiri dipanggil lurah untuk koordinasi, dan ada janji pupuk ekstra kalau RW saya pasang baliho mereka. Saya terima karena warga butuh, dan saya takut kalau gak dukung, data bansos RW bisa ditinjau ulang.” (Wawancara IN 14 September 2025)

Bentuk selanjutnya adalah tekanan dari koordinator bansos atau aparat lokal yang mengarahkan untuk memilih paslon tertentu. Dikarenakan masyarakat penerima bansos di Desa Kasihan ini masih menganut budaya patronase yang kuat, menyebabkan mereka lebih mempercayai elit lokal yang memiliki kedudukan di desa. Selain itu juga berbasis kedekatan emosional maupun rasa terima kasih karena sudah mengelola bansos.

“Di sini, sikap kebanyakan pasrah dan ikut kades, karena kami satu RT saling bergantung. Ada yang marah pelan seperti Pak RT yang bilang "Ini haram, bansos hak rakyat!", tapi diem aja takut kena sanksi desa. Kebanyakan acuh atau pasrah, opini umum di pos ronda malam kalau kata suami saya: "Ikut aja yang bagi sembako, yang penting panen aman dan bansos cair." Saya dengar dari arisan perempuan,

banyak yang seperti saya dukung Prabowo karena takut hilang bantuan, karena di desa, politisasi ini seperti adat nggak bisa lawan sendirian.” (Wawancara AMN 48 th12 September 2025)

Bentuk selanjutnya adalah ancaman bahwa data penerima PKH atau BPNT akan dihapus apabila tidak loyal pada kandidat yang berkuasa. Hal ini menyebabkan masyarakat bimbang antara harus memilih berdasarkan kebutuhan pokok atau berdasarkan hati nurani. Akibatnya, masyarakat memilih bukan berdasarkan visi kandidat akan tetapi berdasarkan ketakutan akan kehilangan bantuan sosial. Sebagaimana diakui oleh beberapa informan yang menyatakan memilih paslon tertentu dengan alasan keamanan bansos. Hal ini menunjukkan bahwa politisasi bansos menggeser nilai demokrasi menjadi transaksional.

“Opini pribadi saya, politisasi bansos itu merugikan tapi seperti nasib desa yang harus diterima. Nggak adil karena kami miskin dijadikan umpan suara, bansos seharusnya hak dari pajak rakyat, bukan alat beli loyalitas. Mengapa merugikan? Karena bikin kami takut bebas pilih saya dengar cerita tetangga yang dukung paslon lain, bansosnya telat berbulan-bulan pas verifikasi. Di desa, kami bergantung sama kades yang satu partai, jadi kalau nggak ikut, lahan tanam bisa kena imbas. Tapi saya mikir, tanpa politisasi ini, bansos mungkin nggak sampai pelosok seperti Kasihan, karena butuh dukungan politik lokal. Jadi, opini saya campur rugi tapi untung sementara.” (Wawancara AMN 48 th12 September 2025)

Menanggapi hal tersebut, masyarakat memberikan respon berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam masyarakat terdapat tiga respon dalam menanggapi hal ini. Ketiga respon tersebut antara lain respon apatis, respon pragmatis, dan respon kritis. Perbedaan respon yang diberikan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman, dan kondisi ekonomi keluarga.

Respon Apatis

Respon pertama yang akan dibahas adalah respon apatis. Pengertian apatis adalah sikap tidak peduli, masa bodoh terhadap suatu hal. Dalam konteks ini adalah mengenai hasil pemilu 2024. Sikap apatis berarti mereka cenderung lebih menikmati dunianya sendiri dan tidak memperhatikan lingkungannya. Apatisme muncul dari kombinasi faktor beban ekonomi yang tinggi, dan pengalaman mereka bahwa protes atau keberatan tidak mengubah kondisi material mereka. Dalam wawancara kebanyakan informan lebih memilih untuk ikut saja atau fokus kepada urusan pekerjaan mereka tanpa mau masuk pada urusan politik karena takut konsekuensi atau karena merasa tidak punya kapasitas untuk memengaruhi kebijakan.

“Di lingkungan saya, kebanyakan pasrah. Ada yang marah tapi cuma ngomel doang, nggak berani protes. Opini umumnya, "Ya sudahlah, yang penting

dapat bansosnya". Tapi ada juga yang acuh, bilang politik urusan orang kaya, kami cuma ikut aja." (Wawancara ST 45 th, 12 September 2025)

Masyarakat dengan respon apatis menganggap apabila politisasi bansos merupakan hal yang lumrah terjadi dan tidak perlu dipersoalkan. Pemahaman terbatas masyarakat dimanfaatkan oleh politisi yang mengklaim bahwa bansos akan berhenti apabila paslon lain yang tidak melakukan politisasi terpilih. Mereka membuat bansos seolah-olah merupakan hasil kebaikan pribadi politisi atau partai alih-alih menyadari bahwa bansos bersumber dari APBN. Pemilu tidak lagi dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan pemimpin terbaik berdasarkan gagasan, melainkan sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan sembako atau uang tunai.

"Pendapat yang saya sering dengar nyoblos yang ngasih modal besok mbak. Perkara bener atau salah sebenarnya tidak peduli, cuman sejauh ini yang diucapkan ya itu kita dapat misalnya kemarin ada DPRD bilang kalau misalnya dia jadi DPRD bakalan benerin jalan tempat kita. Lalu ya kita berbondong-bondong milih dia nyatanya jalannya diperbaiki gitu dan sekarang udah enak ini contoh nyatanya sih mbak. Menurut saya juga *sopo ae seng dadi podo wae mbak, ora obah ora mamah*." (Wawancara SPH 47 th, 11 September 2025)

Sikap apatis yang muncul dalam masyarakat adalah masyarakat tidak menolak hadirnya bantuan sosial maupun praktik politisasi akan tetapi memilih tidak mengurus atau bereaksi secara politis karena prioritas utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Masyarakat desa lebih memilih mengikuti arahan kepala desa dalam menentukan pilihan politik karena khawatir data penerima bantuan sosial akan dicabut.

"Di sini, sikap kebanyakan pasrah dan ikut kades, karena kami satu RT saling bergantung. Ada yang marah pelan seperti Pak RT yang bilang "Ini haram, bansos hak rakyat!", tapi diem aja takut kena sanksi desa. Kebanyakan acuh atau pasrah, opini umum di pos ronda malam kalau kata suami saya: "Ikut aja yang bagi sembako, yang penting panen aman dan bansos cair." Saya dengar dari arisan perempuan, banyak yang seperti saya dukung Prabowo karena takut hilang bantuan, karena di desa, politisasi ini seperti adat nggak bisa lawan sendirian." (Wawancara AMN 48 th 12 September 2025)

Dengan demikian, sikap apatis warga bukan berarti ketidakpedulian total mereka terhadap politik, akan tetapi merupakan sebuah respon yang adaptif terhadap situasi struktural yang menekan. Dalam konteks penelitian ini, maka apatis merupakan cerminan bahwa keterdesakan ekonomi membuat masyarakat memilih diam. Hal ini dilakukan demi mempertahankan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sikap seperti ini akan mencederai nilai moral

keadilan, melanggengkan ketergantungan, dan menggeser nilai-nilai pemilu.

Respon Pragmatis

Respon selanjutnya adalah respon pragmatis. Sikap pragmatis merupakan sikap yang memilih untuk fokus kepada hasil nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, sikap pragmatis mengabaikan nilai kebenaran secara moral. Masyarakat yang memiliki sikap pragmatis memiliki pengetahuan politik yang didasarkan pada perhitungan rasional untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, berdasarkan situasi terkini mereka yang berada pada kondisi ekonomi yang lemah, dan berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari.

"Bansos ini memengaruhi hidup saya secara positif besar mbak, seperti pondasi rumah yang bikin stabil. Perubahan positif anak bungsu bisa kuliah tanpa putus, dulu dia cuma lulus SMA dan kerja buruh, sekarang punya prospek guru agama. Kesehatan keluarga lebih aman berkat KIS saya sendiri punya riwayat maag, bisa periksa rutin tanpa khawatir biaya Rp 100.000 per kunjungan. BPNT dan PKH bikin pengeluaran pokok terkendali, saya bisa alokasikan upah RT untuk beli benih unggul atau bantu gotong royong. Sebagai Ketua RT, bansos ini bantu saya lebih dipercayai oleh warga mereka percaya saya karena saya bisa kasih info akurat soal pencairan, dan lingkungan RW lebih rapi karena gak ada yang kelaparan ekstrem. Kendalanya, pencairan PKH per tiga bulan bikin bulan akhir ketat. Proses verifikasi juga ribet, harus ke kecamatan bolak-balik naik motor, tambah biaya bensin Rp 30.000. Kadang data error karena nama salah eja, nunggu satu bulan untuk koreksi. Meski begitu, bansos bikin saya lebih optimis, bisa merencanakan panen berikutnya tanpa panik." (Wawancara IN 52 th 14 September 2025)

Warga yang memiliki respon pragmatis akan menilai kandidat berdasarkan apa yang dirasakan sekarang. Misalnya adalah pemberian beras, tambahan pupuk, dan berlanjutnya program bantuan sosial daripada memikirkan rencana kebijakan jangka panjang para pasangan calon. Masyarakat dengan respon pragmatis akan memilih calon yang melanjutkan bansos walaupun sebenarnya menyadari akan adanya politisasi bansos. Mereka menganggap bahwa paslon yang berjanji akan melanjutkan bansos akan membuat mereka merasa aman.

"Memengaruhi sangat, saya justru dukung paslon yang terlibat politisasi seperti Prabowo-Gibran. Mengapa? Janji mereka soal tambah bansos petani terasa terjamin, ditambah "nasihat" kades bahwa kalau pilih Anies atau Ganjar, data penerima PKH desa bisa di kaji ulang dan hilang kalau dianggap "nggak loyal." Saya tolak paslon lain meski janji irigasi bagus, karena takut bayangin putri saya nggak bisa sekolah, atau suami nggak ada obat gara-gara bansos berhenti. Sikap saya di desa: pilih yang "melindungi" kami, bukan yang idealis tapi

berisiko, karena hidup tanah kami rapuh seperti tanah liat basah.” (Wawancara AMN 48 th12 September 2025)

Pernyataan informan IN digambarkan bahwa dalam masyarakat pragmatis terdapat kontradiksi pengetahuan dan tindakan.. Masyarakat memahami politisasi sebagai tindakan yang tidak adil tetapi tetap terlibat atau menerima karena ancaman nyata terhadap keberlangsungan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini pengetahuan politik dipakai untuk meminimalkan resiko rumah tangga bukan untuk menegakkan prinsip demokrasi. Dampak dari hal ini membuat perilaku pragmatis ini tampak rasional dari sudut pandang mereka yang membutuhkan.

“Iya, saya alami dan dengar langsung sebagai Ketua RT, mbak. Pas Maret 2024, tim kampanye paslon 2 datang ke balai desa, bagi sembako 5 kg beras dan 1 liter minyak ke penerima PKH di RW saya, tapi bilang secara halus, "Ini tambahan dari program pemerintah, dukung yang lanjutkan biar bansos aman terus." Saya sendiri dipanggil lurah untuk koordinasi, dan ada janji pupuk ekstra kalau RW saya pasang baliho mereka. Saya terima karena warga butuh, dan saya takut kalau gak dukung, data bansos RW bisa dikaji ulang. Opini saya, praktik ini wajar-wajar saja di desa, meski gak ideal. Ini seperti "timbang balik", bansos kan dari pajak rakyat, dan kandidat yang janji lanjutkan layak didukung. Tapi saya akui, bikin gak nyaman karena tekanan, apalagi saya pilih paslon itu karena takut bansos hilang. Sebagai Ketua RT, saya sarankan jangan terlalu kasar, tapi realitanya, politik desa begini.” (Wawancara IN 52 th 14 September 2025)

Keterbatasan pengetahuan dan waktu dikarenakan banyak masyarakat yang bekerja secara fisik/bertani mengakibatkan waktu untuk mengecek detail kebijakan atau lebih lama untuk berdiskusi mengenai program pasangan calon menjadi sangat terbatas. Dikarenakan hal tersebut mereka menggunakan jalan pintas yang mudah dengan cara memilih atau memberi dukungan siapa saja yang bisa membuat mereka merasa hidup menjadi aman. Selain itu, budaya untuk menghormati orang yang memiliki otoritas lebih tinggi membuat mereka ketergantungan kepada informasi lokal dan elit politik sehingga cenderung percaya kepada rekomendasi tokoh tersebut, contohnya seperti Ketua RT, koordinator bansos, dan Kades.

“Opini pribadi saya, politisasi bansos itu merugikan tapi seperti nasib desa yang harus diterima. Nggak adil karena kami miskin dijadikan umpan suara, bansos seharusnya hak dari pajak rakyat, bukan alat beli loyalitas. Mengapa merugikan? Karena bikin kami takut bebas pilih saya dengar cerita tetangga yang dukung paslon lain, bansosnya telat berbulan-bulan pas verifikasi. Di desa, kami bergantung sama kades yang satu partai, jadi kalau nggak ikut, lahan tanam bisa kena imbas. Tapi saya mikir, tanpa politisasi ini, bansos mungkin nggak sampai

pelosok seperti Kasihan, karena butuh dukungan politik lokal. Jadi, opini saya campur rugi tapi untung sementara.” (Wawancara AMN 48 th12 September 2025)

Opini mereka mengenai bansos merupakan hal yang merugikan. Mereka menyadari bahwa dengan adanya politisasi bansos ini membuat masyarakat miskin hanya dijadikan sebagai umpan suara. Mereka juga menyadari bahwa adanya politisasi bansos hanya akan membuat masyarakat tidak mandiri. Akan tetapi, mereka merasa bahwa hal tersebut merupakan nasib desa yang harus diterima. Hal itu didasarkan pada pengalaman mereka bahwa, apabila tidak loyal bansos akan dicabut. Sebagai orang yang bergantung kepada bansos maka hal ini adalah ancaman. Selain itu juga mereka menilai adanya politisasi bansos ini sebagai cara kandidat dekat dengan rakyat. Mereka menyatakan bahwa politisasi merupakan hal yang wajar ditingkat desa. Implementasi demokrasi yang bersih terasa sulit karena sudah menjadi kebiasaan.

“Opini pribadi saya tentang politisasi bansos adalah campur aduk paham kenapa terjadi, tapi sadar ada sisi buruknya. Politisasi ini berarti bansos dipakai sebagai "umpan" untuk suara, seperti janji tambah PKH kalau dukung paslon tertentu. Buat saya, ini lumayan adil dalam konteks desa miskin seperti Kasihan, karena kandidat yang dukung bansos layak dapat suara kami kan pilih yang janji bantu kami bertahan. Tapi merugikan juga mbak kan masyarakat miskin karena bikin pilihan kami gak sepenuhnya bebas, tapi lebih karena ketakutan. Mengapa? Di desa seperti kami, bansos adalah "nyawa" hidup tanpa itu, kami gak bisa sekolah anak atau beli pupuk. Jadi, kalau ada politisasi, kami terpaksa dukung yang janji lanjutkan, meski hati nurani bilang ini gak bener. Sebagai Ketua RT, saya lihat ini merugikan karena bikin warga bergantung politik, gak mandiri, dan kalau paslon kalah, bansos bisa terancam. Tapi saya paham, politik kan soal dukungan, dan di tingkat desa, ini cara kandidat "dekat" dengan rakyat. Saya gak bilang bagus, tapi realita: lebih baik dapat bansos dengan syarat daripada gak sama sekali. Kalau adil sempurna, ya bagus, tapi susah diimplementasi di sini.” (Wawancara IN 52 th 14 September 2025)

Pernyataan informan IN digambarkan bahwa dalam masyarakat pragmatis terdapat kontradiksi pengetahuan dan tindakan.. Masyarakat memahami politisasi sebagai tindakan yang tidak adil tetapi tetap terlibat atau menerima karena ancaman nyata terhadap keberlangsungan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini pengetahuan politik dipakai untuk meminimalkan resiko rumah tangga bukan untuk menegakkan prinsip demokrasi. Dampak dari hal ini membuat perilaku pragmatis ini tampak rasional dari sudut pandang mereka yang membutuhkan.

Dampak dari respon pragmatis masyarakat akan menyebabkan kerentanan terhadap manipulasi dan misinformasi. Karena bergantung pada info lokal

membuat masyarakat lebih rentan terhadap manipulasi kampanye yang berbasis materi yang mencampuradukkan bantuan dengan ajakan politik. Implementasi hal ini dalam masyarakat adalah banyaknya acara pembagian sembako dengan menyertakan pesan untuk mendukung paslon tertentu. Selain itu, ketiadaan akses kesumber independen seperti media lokal yang analitis, NGO pengawas, layanan pengaduan yang mudah, memperkuat aktor yang memonopoli informasi di tingkat desa.

Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap keberlangsungan demokrasi lokal. Keputusan memilih yang bersifat pragmatis mengubah pilihan menjadi fungsi distribusi secara materi, memperkuat politik patronase. Ini melemahkan akuntabilitas kebijakan jangka panjang. Selain itu, politisasi bansos juga menimbulkan kecurigaan antarwarga dan memicu potensi perpecahan lokal.

Pengetahuan politik warga yang bersifat pragmatis bersifat terapan, yakni berbasis pengalaman lokal. Mereka memahami bahwa program dan aktor yang memengaruhi akses kesejahteraan, tahu bahwa politisasi bansos itu tidak adil, namun menimbang resiko praktis dan mereka memilih tindakan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, intervensi yang efektif harus menasar akses informasi yang independen, literasi politik, dan pengurangan ketergantungan secara ekonomi.

Respon Kritis

Selain apatisisme dan pragmatisme terdapat sekelompok warga meskipun masih minoritas menunjukkan respon kritis. Dalam konteks penelitian ini, respon kritis dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran politik yang ditandai dengan kemampuan untuk menilai kebijakan pemerintah seperti janji politik dan praktik sosial secara rasional, reflektif, dan berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan.

Dalam hal kemampuan mengidentifikasi janji-janji kampanye, mereka memiliki kemampuan menimbang janji politik dan pengalaman sehari-hari mereka secara langsung. Mereka mampu menilai bagaimana program kandidat terimplementasi di lapangan, mereka tidak hanya menilai dari isi janji akan tetapi juga konsistensi dan rekam jejak pelaksanaannya. Masyarakat yang memiliki respon kritis memiliki kesadaran evaluatif dan mereka tidak mudah dibujuk oleh manipulasi politik.

“Janji Prabowo soal makan siang gratis anak sekolah, bagus kalau sasarannya daerah terpencil seperti di sini, anak saya pasti dapat manfaatnya. Akan tetapi menjadi pertanyaan apabila daerah kota juga mendapatkan karena secara anggaran saya rasa tidak masuk akal. Ganjar janji lanjutin bansos, itu bagus. Tapi Anies janji bikin bebas kemiskinan, saya ragu karena dia kan cuma gubernur dulu, nggak tahu bisa terapin nasional. Semua janji bagus tapi saya lihat dulu siapa yang benar-benar menepati.

Kalau cuma ngomong bansos dinaikkan, tapi datanya masih banyak yang salah itu artinya belum siap.” (Wawancara ST 45 th, 12 September 2025)

Masyarakat dengan respon kritis mulai menyadari bahwa praktik politisasi bansos merupakan bentuk manipulasi politik yang merugikan masyarakat miskin. Mereka berani mengemukakan pendapat secara rasional terhadap penyimpangan tersebut, meskipun masih dalam batas-batas yang masih aman secara sosial. Mereka menyadari bahwa dalam kontestasi politik ada kalanya bantuan sosial bukan hanya sekedar bantuan ekonomi, melainkan juga alat kontrol politik yang menghambat kebebasan memilih.

“Opini saya, itu merugikan banget buat kami yang miskin. Nggak adil, karena kami butuh bansos buat hidup, tapi malah dipaksa pilih orang tertentu. Mengapa? Karena kami nggak punya pilihan lain, takut bansos dipotong kalau nggak nurut. Ini bikin kemiskinan nggak selesai-selesai, malah jadi alat politik.” (Wawancara ST 45 th, 12 September 2025)

Masyarakat dengan respon kritis memberikan opini bahwa politisasi merupakan hal yang negatif. Bagi mereka, politisasi bansos seperti racun yang dapat merusak hati nurani masyarakat miskin. Masyarakat dengan respon kritis menyadaribahwa bansos merupakan hak rakyat dari pajak. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa pemberian suara tidak boleh diberikan dengan kepentingan tertentu. Karena hal ini dapat membuat masyarakat bergantung secara total dan melemahkan kemandirian desa.

“Opini saya secara pribadi tentang politisasi bansos ini sangat negatif, mbak. Saya anggap ini seperti racun yang merusak hati nurani rakyat miskin seperti kami. Politisasi bansos berarti pemerintah atau kandidat pakai bantuan yang seharusnya hak kami seperti PKH atau sembako untuk tekanan politik, misalnya janji tambah bansos kalau pilih mereka, atau ancam cabut kalau gak dukung. Ini gak adil sama sekali, malah sangat merugikan masyarakat miskin. Mengapa? Karena kami yang miskin ini hidup tergantung bansos tanpa itu, kami gak bisa makan, bayar sekolah anak, atau obat sakit. Jadi, kami dipaksa pilih berdasarkan takut, bukan karena yakin janji mereka bagus atau visi mereka cocok buat desa. Rasanya seperti diperdagangkan, hati kami dibeli dengan beras dan uang kecil...” (Wawancara LS 48 th, 14 September 2025)

Masyarakat yang memiliki respon kritis tidak hanya menilai politik dari aspek material belaka, akan tetapi juga mulai mempertanyakan moralitas dan keadilan di balik sebuah kebijakan sosial. Selain itu, warga yang memiliki posisi sosial seperti Ketua RT atau koordinator PKK menunjukkan bentuk kritik yang lebih terstruktur. Mereka menyadari bahwa politisasi bansos menyebabkan ketergantungan dan melemahkan kemandirian desa. Walau masih dihadapkan kepada rasa takut akan sanksi sosial atau kehilangan hak bansos, bentuk kesadaran ini

menandakan adanya cikal bakal sikap kritis di tengah struktur sosial yang hierarkis.

“Iya, saya alami langsung mbak, dan itu bikin saya sedih sekaligus takut. Pas kampanye Maret 2024, ada acara di balai desa yang katanya bagi sembako gratis dari program pemerintah, tapi sebenarnya dukungan paslon nomor 2 (Prabowo-Gibran). Petugas desa, yang kebetulan kader partai, bilang ke kami penerima PKH, “Ini bantuan tambahan, tapi ingat ya, pilih yang sudah bantu Jokowi ini supaya bansos gak dicabut.” Mereka bagi beras 5 kg dan minyak 1 liter per keluarga, tapi syaratnya hadir acara dan pasang stiker kampanye di rumah. Saya juga dengar dari tetangga soal janji bansos pupuk tambahan kalau dukung paslon 3. Opini saya, praktik ini salah besar dan gak manusiawi. Bansos harus hak rakyat miskin, bukan alat tukar suara politik. Ini bikin kami yang sudah susah tambah tertekan, takut kehilangan bantuan yang jadi penopang hidup. Sebagai orang berpengaruh di PKK, saya ingin protes, tapi diam karena khawatir dicap oposisi dan bansos keluarga saya berhenti.” (Wawancara LS 48 th, 14 September 2025)

Berdasarkan temuan dilapangan, respon kritis masyarakat didasarkan kepada pengetahuan praktis, pengalaman sosial, dan refleksi moral. Dalam menilai calon pemimpin mereka berorientasi kepada nilai moral dan keadilan. Mereka menolak praktik politik transaksional yang menggunakan bantuan sosial sebagai alat kampanye. Hal ini, mencerminkan masyarakat yang memiliki penalaran moral yang kuat, di mana masyarakat tidak lagi menilai politik hanya dari segi ekonomi semata, tetapi juga dari sisi etika dan tanggung jawab sosial sebagai pemimpin. Masyarakat dengan respon kritis akan menolak paslon yang melakukan politisasi bansos.

“Iya, memengaruhi. Saya lebih cenderung tolak paslon yang keliatan pakai bansos buat kampanye, meskipun janjinya bagus. Saya pilih berdasarkan siapa yang janji bikin bansos netral, artinya orang yang melakukan politisasi bansos mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Belum jadi pemimpin saja sudah seperti itu apalagi sudah. Bukan tidak mungkin nantinya masyarakat kecil seperti kami yang akan menjadi korban.” (Wawancara ST 45 th, 12 September 2025)

Harapan yang diutarakan oleh kelompok kritis juga menunjukkan pemikiran panjang ke masa depan mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih. Mereka mengusulkan agar penyaluran bansos juga dikelola secara digital dan transparan melalui lembaga independen. Hal ini dilakukan untuk menghindari campur tangan aparat politik lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat sudah muncul tuntutan akan tata kelola kebijakan yang lebih akuntabel. Hal ini mengenai pentingnya transparansi dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan sosial.

“...Seharusnya bansos dikelola agar tetap netral dari politik dengan cara pertama, buat undang-undang khusus yang larang campur aduk bansos dengan kampanye, dengan sanksi berat seperti hukuman bagi pejabat yang melanggar. Kedua, distribusi lewat platform digital terintegrasi, seperti e-wallet atau aplikasi pemerintah yang transparan, di mana penerima bisa lacak sendiri tanpa campur tangan lokal yang partisan. Ketiga, awasi ketat oleh lembaga independen seperti Bawaslu atau KPK, dengan evaluasi rutin dan pelaporan publik, supaya gak ada lagi bagi-bagi sembako di acara politik. Keempat, libatkan masyarakat sipil seperti PKK atau karang taruna dalam pengawasan, biar data penerima akurat dan gak dimanipulasi. Pesan akhir saya Ingat, kami rakyat miskin seperti di Desa Kasihan ini punya hak suara yang sama, tapi kami butuh pemimpin yang adil, bukan yang beli suara dengan bansos. Kalau bansos netral dan efektif, kami bisa mandiri, desa maju, dan Indonesia lebih baik. Terima kasih sudah dengar cerita saya semoga perubahan datang segera”. (Wawancara LS 48 th, 14 September 2025)

Sikap kritis memiliki implikasi penting terhadap kualitas demokrasi desa. Munculnya kesadaran untuk menolak politik transaksional menunjukkan pergeseran budaya politik dari materialistik menjadi rasional dan etis. Meskipun jumlahnya belum dominan, kelompok dengan sikap kritis memiliki potensi menjadi agen perubahan sosial yang dapat menumbuhkan budaya politik yang lebih partisipatif. Sikap kritis masyarakat Desa Kasihan mencerminkan kesadaran politik yang berkembang, di mana masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima kebijakan akan tetapi sebagai pengawas moral terhadap penyelenggaraan negara. Kelompok ini menandai lahirnya fase baru dalam dinamika politik pedesaan dari yang awalnya ketergantungan menuju politik kesadaran.

Pembahasan

Respon masyarakat penerima bantuan sosial terhadap isu pengentasan kemiskinan saat pilpres 2024 sejalan dengan teori respon S-O-R yang dikemukakan oleh Hovland dkk. (1953) yang awalnya berkembang dalam bidang psikologi komunikasi, kemudian banyak digunakan dalam penelitian komunikasi politik dan sosial. Berdasarkan teori ini, ketika seseorang mendapatkan stimulus hal tersebut akan memengaruhi opini dan sikap mereka dalam merespon suatu hal. Teori Stimulus-Organism-Respons merupakan teori yang menjelaskan bagaimana rangsangan (stimulus) yang diterima individu akan diolah oleh organisme (penerima pesan), sehingga menghasilkan respon tertentu (apatis, pragmatis, dan kritis).

Stimulus (S) merupakan pesan, informasi, atau tindakan yang diterima individu dari lingkungan eksternal. Dalam konteks penelitian ini adalah pesan kampanye, janji

politik, atau pembagian bansos. Kemudian, Organism (O) adalah masyarakat yang mendapatkan stimulus tersebut dalam memaknai stimulus tersebut yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan pengalaman menerima bantuan. Selanjutnya, Response (R) merupakan hasil dari proses pengolahan stimulus oleh individu berupa respon misalnya dengan mendukung calon tertentu, bersikap pasrah, atau bersikap kritis.

Apabila ditinjau dari hasil wawancara, stimulus utama yang diterima masyarakat berupa bantuan sosial (bansos) yang secara langsung memengaruhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kedua, pesan politik dan kampanye calon presiden yang menjanjikan keberlanjutan program bansos, yang ketiga adalah tekanan sosial atau ancaman tersirat dari aparat desa atau koordinator bansos untuk memilih calon tertentu. Stimulus ini bersifat ganda yaitu ekonomi dan psikologis. Disatu sisi masyarakat menerima bansos sebagai bentuk kepedulian pemerintah namun di sisi lain, mereka juga merasakan tekanan dan ketergantungan.

Tahap organism dalam teori S-O-R menggambarkan bagaimana stimulus diproses oleh individu berdasarkan pengalaman, nilai, dan kondisi hidupnya. Dalam konteks Desa Kasihan, karakteristik organisme (penerima stimulus) ditandai dengan kondisi ekonomi yang lemah dalam artian masyarakat bergantung pada pertanian dan bantuan pemerintah. Karakter selanjutnya Pendidikan relatif rendah yakni sebagian besar hanya lulusan SD-SMP. Akses informasi terbatas yakni hanya mengandalkan televisi, obrolan warga, dan informasi dari aparat desa. Karakter terakhir adalah budaya paternalistik, di mana warga sangat menghormati dan mengikuti arahan tokoh desa (kades, ketua RT, koordinator PKK).

Tahap response merupakan hasil akhir dari proses penerimaan stimulus. Berdasarkan wawancara terdapat tiga respon masyarakat terhadap stimulus politisasi bansos. Merujuk pada studi literatur, ketiga respon yang diberikan masyarakat sesuai dengan teori Partisipasi Politik dari Milbrath dan Goel (1977). Dalam piramida partisipasi Milbrath dan Goel menyebutkan bahwa masyarakat dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tersebut didasarkan kepada intensitas keterlibatan. Mulai dari warga yang aktif terlibat hingga yang tidak memiliki keterlibatan sama sekali. Model ini relevan untuk menjelaskan perbedaan respon masyarakat Desa Kasihan terhadap fenomena politisasi bantuan sosial.

Respon pertama, yakni respon pasrah dan patuh. Warga menerima stimulus politik secara pasif. Mereka cenderung mengikuti arahan aparat desa karena takut kehilangan bantuan. Respon kedua bersifat rasional-pragmatis yang berarti sebagian masyarakat menilai politisasi bansos sebagai hal wajar selama membawa manfaat konkret. Respon ini menunjukkan kalkulasi sosial-ekonomi dalam memaknai stimulus. Artinya,

bahwa keputusan politik dibuat berdasarkan manfaat material bukan kesadaran demokratis. Respon terakhir yakni respon kritis dan reflektif. Sebagian kecil masyarakat terutama tokoh perempuan aktif dan tokoh lokal mulai mengembangkan kesadaran kritis terhadap manipulasi politik melalui bansos. Respon ini merupakan bentuk counter stimulus, di mana individu memproses informasi secara rasional dan menolak dominasi kekuasaan. Dalam kerangka S-O-R, tipe respon ini menunjukkan intervensi kesadaran (awareness).

Berdasarkan temuan lapangan, ditemukan tiga bentuk respon masyarakat terhadap terhadap politisasi bansos, yakni respon apatis, respon pragmatis, dan respon kritis. Apabila diperhatikan ketiga respon ini tidak muncul secara terpisah, akan tetapi membentuk skala kesadaran sosial-politik yang merefleksikan tingkat pemahaman, kepentingan ekonomi, serta pengalaman interaksi masyarakat dengan aktor politik dan aparat desa. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi politik dari Milbrath dan Goel yang membagi masyarakat berdasarkan tiga tingkatan. Milbrath dan Goel (dalam Azzuhri, 2023, hlm. 22) menjelaskan bahwa partisipasi politik berada pada sebuah kontinum dari apatis hingga aktivisme. Model piramida partisipasi politik dari Milbrath dan Goel terdiri dari Apoliticals atau apatis, Spectators atau pasif - moderate, dan Gladiators atau sangat aktif. Hal ini sangat relevan untuk membedakan sikap apatis, pragmatis, dan kritis.

Perbandingan ketiga sikap ini penting untuk menunjukkan pola penerimaan stimulus politik dalam kerangka teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response). Sikap apatis menunjukkan ketidakpedulian politik yang pasif. Masyarakat dalam kategori ini tidak menolak atau mendukung politisasi secara terbuka mereka lebih memilih diam, tunduk, atau fokus kepada kehidupan sehari-hari. Apatisme berakar pada kelelahan akibat kondisi ekonomi yang menekan. Respon ini menunjukkan bahwa stimulus politik tidak lagi memicu reaksi sadar, karena masyarakat telah mati rasa terhadap urusan kekuasaan.

Apabila respon apatis ini dikaitkan dengan teori partisipasi politik dari Milbrath dan Goel, maka respon apatis berada pada posisi terendah. Pemetaannya dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat merasa politik adalah urusan elit, takut bicara politik agar tidak kehilangan bansos, kemudian memilih diam atau mengikuti arus tanpa menganalisis.

Respon pragmatis menggambarkan penerimaan aktif dan rasionalitas ekonomi. Warga yang bersikap pragmatis menyadari akan adanya unsur politik dalam bansos, akan tetapi tetap menerimanya melalui pertimbangan manfaat langsung. Mereka menilai dukungan terhadap pemberi bantuan sebagai timbal balik wajar. Respon ini

menunjukkan adanya respon sadar terhadap stimulus, akan tetapi dengan orientasi manfaat jangka pendek yang mengabaikan nilai moral dan demokrasi. Respon pragmatis ini berada pada tingkatan kedua menurut Milbrath dan Goel yakni spectators. Masyarakat ini tidak sepenuhnya pasif akan tetapi terlibat politik secara minimal. Di mana sangat berorientasi pada manfaat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat menanggapi stimulus politik yang sama yakni bantuan sosial dan kampanye dengan cara yang berbeda tergantung pada kondisi sosial, psikologis, dan tingkat kesadaran mereka. Dengan demikian, variasi respon apatis, pragmatis, dan kritis dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi stimulus eksternal bansos dan kampanye sebagai alat komunikasi politik dan organisme internal masyarakat dengan latar sosial ekonomi beragam yang kemudian akan menghasilkan respon berbeda-beda terhadap isu politik.

Selanjutnya respon kritis menunjukkan kesadaran politik yang reflektif dan rasional. Masyarakat yang menunjukkan respon kritis menyadari bahwa bantuan sosial merupakan hak warga negara bukan alat politik. Mereka berani mengungkapkan pendapat dan menginginkan sistem yang transparan. Kelompok ini cenderung muncul di kalangan perempuan aktif secara sosial (PKK), perangkat RT terbuka, serta masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Respon kritis menandakan munculnya respon kognitif tinggi, di mana stimulus politik diproses melalui penalaran moral bukan reaksi emosional atau ekonomis semata. Dalam teori partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel, maka respon ini berada pada posisi tertinggi yaitu gladiators.

Pemetaan ketiga respon beserta alasan umum dan faktor yang paling memengaruhi setiap respon terdapat pada Tabel 1.

Gambaran	Pasrah dan diam; tidak menolak bansos maupun politisasinya; cenderung mengikuti arahan kepala desa dan menganggap politisasi sebagai hal lumrah.	Pasrah dan diam; tidak menolak bansos maupun politisasinya; cenderung mengikuti arahan kepala desa dan menganggap politisasi sebagai hal lumrah.	Pasrah dan diam; tidak menolak bansos maupun politisasinya; cenderung mengikuti arahan kepala desa dan menganggap politisasi sebagai hal lumrah.
Alasan	Takut data penerima bansos dicabut; merasa politik adalah urusan elit; pengalaman bahwa protes tidak mengubah kondisi; prioritas pada kebutuhan dasar sehari-hari.	Takut data penerima bansos dicabut; merasa politik adalah urusan elit; pengalaman bahwa protes tidak mengubah kondisi; prioritas pada kebutuhan dasar sehari-hari.	Takut data penerima bansos dicabut; merasa politik adalah urusan elit; pengalaman bahwa protes tidak mengubah kondisi; prioritas pada kebutuhan dasar sehari-hari.
Faktor	Beban dan keterdesakan ekonomi, disertai pengalaman bahwa keberatan tidak membawa perubahan serta tekanan otoritas desa.	Beban dan keterdesakan ekonomi, disertai pengalaman bahwa keberatan tidak membawa perubahan serta tekanan otoritas desa.	Beban dan keterdesakan ekonomi, disertai pengalaman bahwa keberatan tidak membawa perubahan serta tekanan otoritas desa.

Tabel 1. Pemetaan Respon Apatitis, Pragmatis, dan Kritis Masyarakat Penerima Bansos di Desa Kasihan

Respon	Apatitis	Pragmatis	Kritis
--------	----------	-----------	--------

Sumber: Hasil olah data wawancara

Hasil penelitian memperkuat asumsi dasar teori S-O-R bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus eksternal yang internalisasinya melalui psikologis. Dalam kasus Desa Kasihan, stimulus politik berupa pembagian bansos, janji kampanye, dan tekanan sosial diproses oleh organisme yang memiliki kondisi ekonomi lemah, pendidikan rendah, dan ketergantungan tinggi terhadap struktur kekuasaan desa. Selain melalui Teori S-O-R, teori

partisipasi politik dari Milbrath dan Goel membantu menjelaskan tahapan kesadaran politik masyarakat dari apatis ke pragmatis lalu ke tingkatan yang tinggi yakni kritis. Hal ini menegaskan bahwa respon kritis akan muncul apabila jika proses internal organisme diwarnai oleh akses informasi, pengalaman sosial, dan keberanian moral. Oleh karena itu, perubahan sosial dan politik tidak cukup hanya mengubah stimulus tetapi juga harus menyentuh aspek organisme seperti melalui pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan literasi warga.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menjelaskan bahwa respon masyarakat penerima bantuan sosial dalam menanggapi isu pengentasan kemiskinan terdapat tiga respon, yakni respon apatis, respon pragmatis, dan respon kritis.

Masyarakat dengan respon apatis tidak peduli dengan isu yang ada, yang terpenting menurut mereka adalah bansos mereka aman. Hal ini menyebabkan mereka menerima stimulus dari aparat dengan sukarela tanpa ada perlawanan berarti. Selanjutnya, respon pragmatis merupakan respon yang terjadi ketika masyarakat berpikir secara kalkulatif. Mereka mengetahui politisasi yang terjadi, akan tetapi memilih pasangan calon tersebut dengan harapan bahwa pilihan politik yang mereka berikan dapat memberikan rasa aman terhadap bantuan sosial.

Respon yang terakhir yakni respon kritis. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat telah memiliki kemampuan untuk menilai kebijakan secara rasional, reflektif, dan sesuai dengan pertimbangan moral dan keadilan. Masyarakat dengan respon kritis akan menolak paslon dengan politisasi bansos. Hal itu didasari dengan kesadaran mereka bahwa bansos merupakan hak rakyat dari pajak bukan pemberian pribadi seseorang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat menanggapi stimulus yang sama yakni bantuan sosial dan kampanye dengan cara yang berbeda. Hal tersebut didasarkan pada kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesadaran yang berbeda yang kemudian menghasilkan variasi respon apatis, pragmatis, dan kritis.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terkait dengan distribusi bantuan sosial. Kajian perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalisir adanya salah sasaran dan manipulasi data.

Selain itu, pemberian bantuan sosial harusnya dipisahkan dari kepentingan politik dan pembagiannya berdasarkan prinsip kemanusiaan. Fokus program perlu dialihkan dari orientasi konsumtif menuju pemberdayaan agar masyarakat lebih berdaya secara ekonomi dan tidak bergantung kepada bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2023). Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(2), 1–13.
- Affandi, R., & Katimin. (2025). Idealisme politik generasi milenial (optimisme dan pesimisme dalam arah baru demokrasi Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 316–322.
- Aisyah, H., Dahlan, D., & Aprilia, M. (2023). Pengaruh hubungan antara ketimpangan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi: Sebuah perspektif di Indonesia. *Jurnal Ekonomia*, 2(12), 3722–3736.
- Apriyani, W., Adha, M. M., & Siswanto, E. (2024). Pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(4), 66–86.
- Dzaky, A., Idris, A., & Saleh, M. H. (2023). Tipe partisipasi politik masyarakat suku Bugis dalam pemilihan walikota Samarinda tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 40–51.
- Firmansyah, M. I., Rahmanto, F., & Purwaningsih, T. (2021). Politik anggaran: Alokasi dana bansos pra-pemilihan presiden 2019 di Indonesia sebagai alat meningkatkan elektabilitas. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>
- Hasibuan, S. A. (2023). Sistem pemilihan umum dalam kaitan dengan negara demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Setyadharma*, 17(2), 602–609.
- Hendratmoko, H., Rahmaji, L. R., & Nugroho, A. (2023). Pengaruh terpaan pemberitaan Puan Maharani di Kompas.com terhadap citra politik Puan Maharani dan dampaknya pada elektabilitas Puan Maharani sebagai capres. *Jurnal Interaksi Online*, 11(3), 368–381.
- Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and persuasion: Psychological studies of opinion change*. Yale University Press.
- Iman, M., Ikhsan, A., & Rangga, G. G. (2024). Pembentukan opini publik pada pemilihan umum 2024 (Studi kasus opini publik – survey elektabilitas capres-cawapres 2024 pasca debat pertama). *Journal Syntax Idea*, 6, 2471–2482.
- Lestari, V. D., Kumalasari, A., & Kasiyami, S. (2024). Media sosial sebagai alat kampanye pemilu 2024:

- Perspektif pengguna TikTok. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 30–37. <https://doi.org/10.33366/jkn.v6i1.442>
- Maemunah, M. (2023). Fenomena money politik dalam Pilkada tahun 2022: Studi kasus Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. *Ulil Albab: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(9), 4484–4489.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Maisaroh, S., Putra Pratama, Z., & Risiko Faristiana. (2023). Respon mahasiswa IAIN Ponorogo terhadap berita hoaks pemilu 2024 di media sosial. *Jurnal Ilmu Res. Student*, 1(2), 413–424.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics?* (2nd ed.). Rand McNally.
- Nurcholifah, S., Wulan, R. T., & Wuryaningsih, T. (2025). Politisasi program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada pemilu tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 413–427.
- Nurfadilah, A. A., & Abrian, R. (2024). Konstruksi kritis dan respon sosial terhadap postingan #KawalPutusanMK pada laman media sosial Instagram @narasinewsroom. Dalam *Konferensi Nasional Mahasiswa Sastra Indonesia* (hlm. 814–831).
- Oktapiani, N., Warjio, W., & Ginting, B. (2022). Partisipasi politik penerima manfaat penyandang disabilitas Program Keluarga Harapan pada pemilihan legislatif 2019. *Perspektif*, 11(3), 1161–1172. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465>
- Onilla, S. R., & Suryawati, R. (2022). Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam menangani penyaluran bantuan sosial tunai (BST) (Studi kasus di Desa Sidoarum). *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 61–76. <https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.13275>
- Pasaribu, J. W. (2023). Tinjauan yuridis terhadap bantuan sosial Covid-19 berdasarkan pendekatan kerangka antikorupsi dan teori keadilan. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 310–329. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p310-329>
- Putra, M., & Umboh, K. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak: Menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5, 19–27.
- Putri, S. I., & Tumengkol, A. (2023). Opini mahasiswa tentang tayangan podcast. *Jurnal Diseminasi Kajian Komunikasi*, 1(1), 53–58.
- Rahmadi, A. N., Mubaroq, A., & Kristiyono. (2024). Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), 245–261.
- Rini, R. D., & Rahmawati, D. H. (2024). Framing pemberitaan politisasi bantuan sosial menjelang pemilu 2024 pada media online Metrotvnews.com, Viva.co.id, dan Okezone.com. *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12996–13000.
- Saipul, H., Ikmal, M., Ihfan, R., & Fatimatuzzahro. (2024). Drama, manuver dan cawe-cawe politik menjelang pilpres 2024. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(4), 189–204.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.